

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas tata kelola (*governance*) akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hipotesis dibangun untuk menduga pengaruh antar dimensi tata kelola (*governance*) terhadap pertumbuhan. Worldwide Governance indikator yang meliputi enam dimensi, yakni, *government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality, dan voice and accountability* digunakan untuk mengukur tata kelola (*governance*).

Dengan menyelidiki pengaruh beberapa aspek tata kelola (*governance*), penelitian ini menyelidiki pengaruh semua indikator tata kelola (*governance*), sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang hubungan tata kelola (*governance*) terhadap pertumbuhan ekonomi, jika pemerintah berkeinginan meningkatkan pertumbuhan dalam rangka kesejahteraan warganya, maka pemerintah tersebut perlu memperbaiki tata kelola (*governance*) dalam menjalankan pemerintahannya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting untuk menilai kinerja suatu perekonomian terutama untuk menganalisis hasil dari proses pembangunan ekonomi suatu negara ataupun wilayah, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas

perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode tertentu yang bisa menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja suatu perekonomian khususnya untuk menganalisis hasil pembangunan peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan ekonomi di suatu daerah (Sukirno, 2008)

Kinerja perekonomian negara yang baik, salah satunya ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Desi, 2015), pertumbuhan ekonomi selama ini baru dianalisis dari faktor-faktor ekonomi semata seperti pajak, FDI (*Foreign Direct Investment*), investasi, inflasi, suku bunga. Salah satu faktor yang sifatnya kuantitatif dan belum banyak diteliti dari sisi tata kelola pemerintahan. Penelitian bidang ini menjadi menarik karena ternyata dengan tata kelola pemerintahan yang baik memfasilitasi berjalannya mekanisme pasar yang efisien (Widodo, 2014). Upaya mewujudkan ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintah sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2013).

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* pertama diusulkan oleh World Bank, UNDP dan Asian Development Bank (ADB), kemudian dikembangkan oleh banyak pakar di negara-negara berkembang guna mewujudkan gagasan-gagasan menyangkut tata pemerintahan. Mengacu pada

laporan World Bank yang ditulis oleh (Kaufman, Kraay, & Lobaton, 2011), terdapat hubungan langsung *good governance, stable government*, dan sosial ekonomi yang lebih baik bahkan *good governance* dijadikan aspek pertimbangan lembaga donor dalam memberikan pinjaman maupun hibah, bahkan tata kelola yang baik dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Di setiap negara berkembang pasti ingin melakukan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dapat menjadi negara maju, serta dapat mewujudkan tujuan untuk memakmurkan masyarakat dan meratakan pembagian pendapatan dalam rangka mewujudkan keadilan, ASEAN terdapat 5 negara yang tergolong dalam perekonomian terbaik, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Singapura Negara dengan perekonomian terbaik dan termapan di ASEAN, negara yang luasnya tidak seberapa ini merupakan satu-satunya negara maju yang ada di kawasan Asia Tenggara, hal ini memberikan makna bahwa tidak selamanya negara besar yang makmur, dengan wilayah yang begitu sempit Singapura menunjukkan kedudukannya sebagai negara maju. Brunei Darussalam merupakan negara terkaya kedua dengan rata-rata pendapatan US\$ 36.609(Rp. 490,56 juta), negara yang mempunyai satu daratan dengan Indonesia dan Malaysia, negara ini memiliki bentuk pemerintahan yang berupa kerajaan, meskipun memiliki kawasan yang kecil tetapi memiliki tambang gas alam yang melimpah, sehingga gas alam inilah yang menjadi komoditas unggulan Brunei Darussalam untuk di ekspor. Malaysia merupakan negara terkaya ketiga, negara yang memiliki kawasan yang cukup luas ini mengunggulkan komoditas berupa barang-barang tambang, negara

yang masih termasuk serumpun dengan Singapura dan Brunei Darussalam, bahkan wilayahnya memiliki karakteristik yang cukup sama dengan negara kita Indonesia. Thailand yang di kenal sebagai negeri gajah putih merupakan negara terkaya keempat, negara yang memiliki julukan sebagai negara lumbung padi dunia ini memanfaatkan komoditas alam nya seperti pertanian. Indonesia merupakan negara terkaya kelima, Negara dengan luas wilayah yang sangat besar ini dan memiliki sumber daya alam yang melimpah serta memiliki rakyat yang cukup banyak.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipacu melalui proses pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan serta hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, diantara golongan minoritas masyarakat yang berpendapatan tinggi atau dari golongan masyarakat berpendapatan rendah, penyerahan kewajiban pembangunan ekonomi apabila dilimpahkan kepada kalangan masyarakat berpendapatan tinggi, maka mereka akan mampu memacu pertumbuhan dengan baik, namun jika yang dipilih adalah mayoritas golongan masyarakat berpendapatan rendah, maka hasil-hasil pembangunan harus dibagi secara merata dan hal ini kurang memungkinkan tercapainya *Gross National Produk* secara nasional pada tingkat yang lebih tinggi (Tofaro, 2013), ASEAN adalah organisasi tingkat suatu kawasan yang mewadahi jalur-jalur kerjasama negara-negara di Asia Tenggara, ASEAN di dirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok (Thailand) oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina, berdirinya ASEAN yang dimana bertujuan untuk menciptakan kerjasama dalam hal pertumbuhan ekonomi, perdamaian dan stabilitas serta perkembangan sosial budaya di kawasan ASEAN (Kementerian luar Negeri Republik Indonesia).

Perkembangan perekonomian dunia semakin mendekati integrasi perekonomian yang semakin luas, salah satunya integrasi di kawasan Asia Tenggara yang melahirkan bentuk integrasi baru yaitu pembentukan komunitas ASEAN, salah satunya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah 21 tahun pembentukannya berlangsung, pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur Malaysia, pada KTT ke-22 deklarasi ASEAN *Concord II* di Bali pada 7 Oktober 2003 mendeklarasikan pembentukan MEA pada tahun 2015 (Kurnianingrum, 2015).

Hasil dari bahasan deklarasi ASEAN *Concord II* tersebut adalah adanya integrasi di kawasan Asia Tenggara dalam 3 bidang utama yaitu, keamanan, ekonomi dan sosial-budaya, integrasi ekonomi ini menjadi perhatian lebih karena dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dari masing-masing negara kawasan integrasi ekonomi yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan adanya aliran perekonomian yang tidak lagi mengenal batas-batas wilayah, perbedaan latar belakang ekonomi masing-masing negara diharapkan tidak lagi menjadi suatu penghalang untuk masyarakat luas dalam merespon integrasi ekonomi tersebut.

MEA merupakan salah satu bentuk integrasi yang disepakati dengan tujuan meningkatkan daya saing ASEAN, modal asing dibutuhkan dalam meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN, ASEAN sendiri telah meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat melalui ASEAN *Vision 2020* saat berlangsungnya ASEAN *Second*

Informal Summit. inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk *roadmap* jangka panjang yang bernama *Hanoi Plan Of Action* yang disepakati pada tahun 1998.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah suatu negara dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi biasa digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan kinerja perekonomian negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, namun peningkatan pertumbuhan ekonomi bukanlah perkara yang dapat dilaksanakan dengan mudah bagi sebagian negara di dunia, permasalahan yang sering dihadapi oleh sebagian negara seperti tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, angka harapan hidup yang rendah, tingkat Pendidikan yang rendah dan kesenjangan pendapatan sering terjadi di negara-negara sedang berkembang dan negara terbelakang yang akan berdampak pada rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara kearah yang lebih baik. Menurut (Jhingan, 2012), pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembangaan dan ideologis yang diperlakukannya. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari suatu periode ke periode tahun berikutnya. tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dicapai oleh suatu negara dengan melalui peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau *Produk Domestik Bruto* (PDB) setiap tahun (Tambunan D. T., 2001). Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah salah satu dari empat tujuan utama kebijakan ekonomi makro. *Gross*

Domestik Bruto (GDP) adalah ukuran atas nilai pasat output berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktot-faktor produksi baik tanah, tenaga kerja, dan modal yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu (Fair, 2014).

Negara-negara di Asia Tenggara pun memiliki perekonomian yang stabil dan memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi tantangan di lingkungan global (Raz, 2012). Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat juga dijalankan oleh negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN dengan visi sampai tahun 2020 adalah memperkuat perekonomian melalui strategi-strategi perekonomian yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan di antara negara-negara dalam satu regional.

Menurut laporan *Asian Development Bank* (ADB), walaupun ekonomi global yang lesu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara, tetapi ekonomi regional tetap akan mempertahankan pertumbuhan kuat berkat kebutuhan domestik dan aktivitas pembangunan di masing-masing negara kawasan itu, negara-negara kawasan ASEAN menjadi harapan di tengah permasalahan yang terus menggelayuti perekonomian global *United Nation* dalam publikasi *Economics and Social Survey of Asia and Pacific 1997* memproyeksi trend pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN akan tumbuh baik sampai abad XXI. Pertumbuhan ekonomi di negara Kawasan ASEAN menunjukkan trend yang cenderung meningkat.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara ASEAN Tahun 2007-2017 (%)

Tahun	Brunei Darussalam	Indonesia	Malaysia	Singapura	Thailand
2007	0.155	6.345	6.299	9.112	5.435
2008	-1.94	6.014	4.832	1.788	1.726
2009	-1.765	4.629	-1.514	-0.603	-0.691
2010	2.599	6.224	7.425	15.24	7.514
2011	3.745	6.17	5.294	6.351	0.84
2012	0.913	6.03	5.473	4.083	7.243
2013	-2.126	5.557	4.694	5.111	2.687
2014	-2.35	5.007	6.007	3.884	0.984
2015	-0.567	4.876	5.028	2.241	3.02
2016	-2.466	5.033	4.22	2.397	3.283
2017	1	5.068	5.902	3.619	3.903
Rata-Rata	-0.25473	4.1342	4.53475	4.9792	3.47825

Sumber : World Bank, 2018

Tabel 1.1 bahwa 5 negara di ASEAN, pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata dari tahun 2007-2017 yaitu Indonesia mencapai 4.1342%, Brunei Darussalam dengan -0.25473%, Thailand dengan 3.47825%, Malaysia dengan 4.53475% dan Singapura dengan 4.9792%, pada setiap negara mengalami peningkatan dan penurunan yang berbeda-beda di setiap tahunnya, hal ini dapat dipengaruhi dari tingkat produksi di masing-masing negara.

Pertumbuhan ekonomi adalah tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ekonomi disuatu wilayah yang akan menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perkembangan *Produk Domestik Bruto* atas harga kosntan dibandingkan tahun sebelumnya.

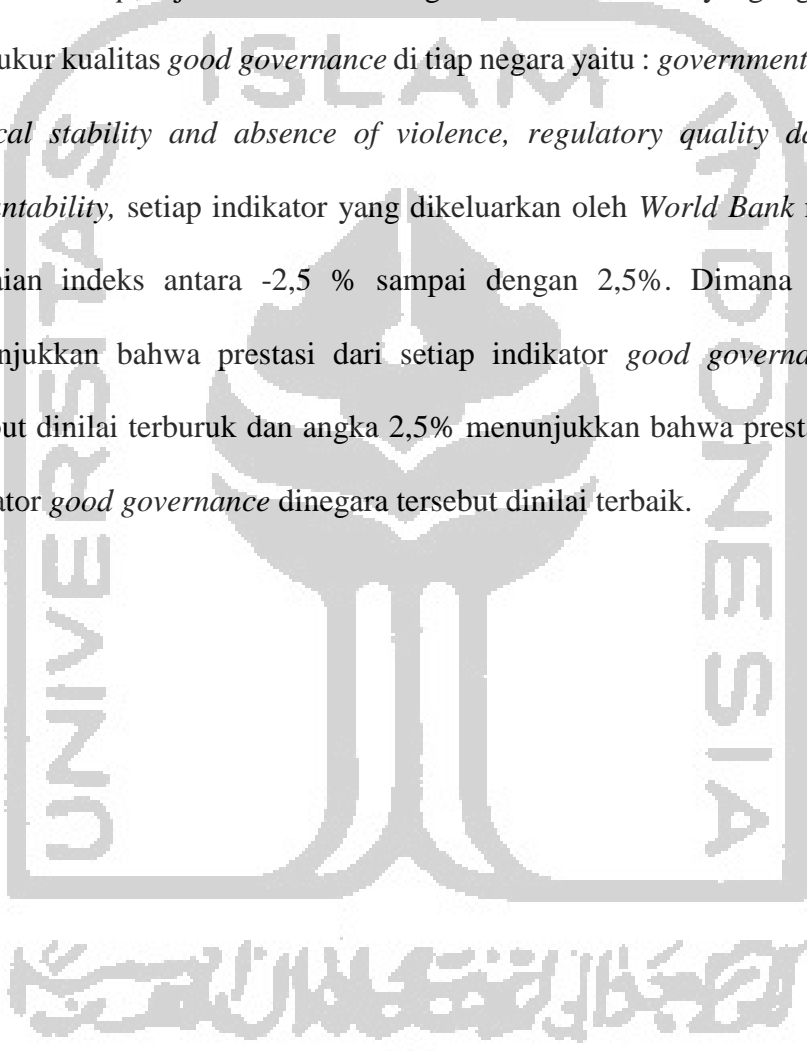
Pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan GDP yang memerlukan peran pemerintah didalam perekonomian, pemerintah selaku pihak yang mempunyai wewenang untuk menerapkan kewajiban untuk menjaga kestabilan ekonomi dan memiliki wewenang untuk menerapkan kebijakan yang dapat mendorong perekonomian, kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian juga tak lepas dari kualitas pemerintah itu sendiri, keberhasilan penyelenggaran tata pemerintah yang baik (*good governance*) ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi dari 3 peran utaman yaitu aparatur pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

Peran pemerintah dalam pembangunan suatu negara saat ini menjadi semakin penting karena mekanisme pasar yang menjadi andalan kaum kapitalis, yang tidak menghendaki adanya campur tangan pemerintah, tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya mengingat krisis ekonomi sudah kerap kali terjadi, aliran *Keynesian* sebenarnya telah mempunyai keyakinan akan munculnya krisis tersebut dengan *argument* bahwa pasar tidak mampu menyelesaikan masalah permintaan dan penawaran, aliran ini berpendapat bahwa suatu saat pasar akan mengalami ketidakseimbangan karena adanya masalah yang sistematis yaitu kegagalan mempertemukan sisi permintaan dan penawaran.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* pertama diusulkan oleh *World Bank*, UNDP dan *Asian Development Bank* (ADB), dan kemudian dikembangkan oleh banyak pakar di negara-negara berkembang guna mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata pemerintahan, mengacu pada

laporan *World Bank* terdapat hubungan langsung antara *good governance, stable government* dan sosial ekonomi yang baik.

World Bank melalui *Macroeconomics and Growth Team-Development Research Group*, sejak tahun 1996 mengeluarkan 6 indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas *good governance* di tiap negara yaitu : *government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality* dan *voice and accountability*, setiap indikator yang dikeluarkan oleh *World Bank* menggunakan penilaian indeks antara -2,5 % sampai dengan 2,5%. Dimana angka -2,5% menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* dinegara tersebut dinilai terburuk dan angka 2,5% menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* dinegara tersebut dinilai terbaik.



Tabel 1. 2 *Government Effectiveness* 5 Negara ASEAN Tahun 2007-2017 (%)

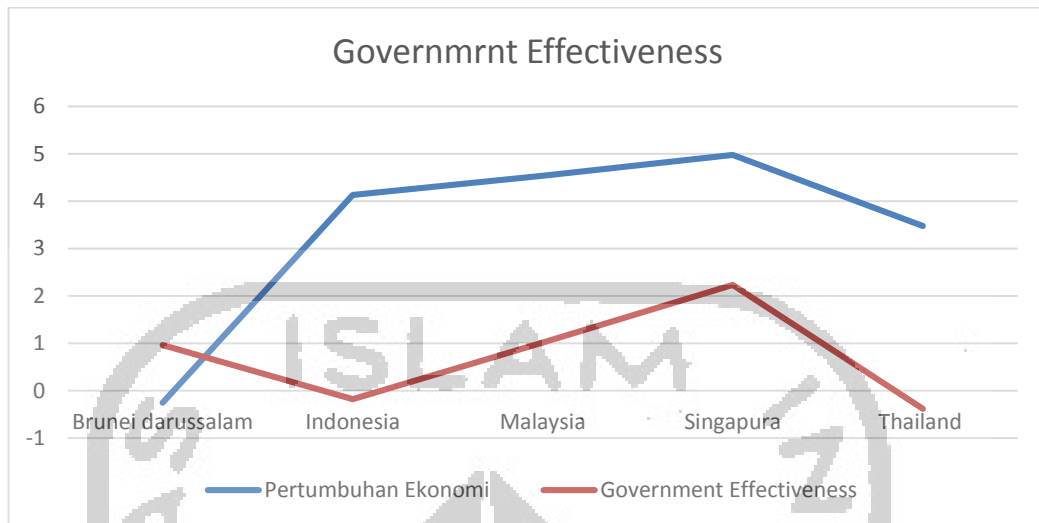
Tahun	Variabel	Brunei Darussalam	Indonesia	Malaysia	Singapura	Thailand
-------	----------	-------------------	-----------	----------	-----------	----------

2007	Government Effectiveness	0.9243966	-0.2771957	1.238987	2.375459	-0.3694969
2008	Government Effectiveness	0.8885025	-0.2372018	1.108519	2.436975	-0.4077929
2009	Government Effectiveness	0.9180717	-0.2981317	0.983706	2.270797	-0.3097054
2010	Government Effectiveness	0.9018937	-0.2143052	1.120518	2.241407	-0.3338629
2011	Government Effectiveness	0.8970225	-0.2594242	1.021163	2.154786	-0.3234649
2012	Government Effectiveness	0.8435253	-0.2729108	0.9198642	2.166091	-0.366163
2013	Government Effectiveness	0.8697733	-0.1987486	0.9998065	2.088955	-0.3435557
2014	Government Effectiveness	1.086335	-0.037205	1.115127	2.182617	-0.4502737
2015	Government Effectiveness	1.060171	-0.2405333	0.9491639	2.236756	-0.4933883
2016	Government Effectiveness	1.084499	0.0075939	0.8747621	2.191794	-0.3890044
2017	Government Effectiveness	1.144513	0.0407612	0.8380826	2.205368	-0.3855207
Rata-rata		0.965337	-0.18066	1.015427	2.23191	-0.37929

Sumber : *World Bank*, 2018

Government Effectiveness adalah ukuran kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan sipil, implementasi kebijakan serta komitmen pemerintah terhadap kebijakan. tabel 1.2 menjelaskan bahwa 5 negara ASEAN, Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia mencerminkan prestasi yang baik dengan menunjukkan rata-rata 2.23, 0.96 dan 1.01 Sedangkan Indonesia dan Thailand mencerminkan prestasi yang cukup buruk dengan nilai rata-rata sebesar -0.18 dan -0.37 maka dapat dilihat dari gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1. 1 rata-rata Government Efectiveness di 5 negara ASEAN



Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa efektivitas pemerintah rendah maka pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN tinggi, karena pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN bergantung pada tata kelola pemerintahannya. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan *government effectiveness* di lima negara ASEAN sudah berjalan dengan baik.

Tabel 1. 3 Political Stability and Absence of Violence 5 Negara ASEAN Tahun 2007-2017 (%)

Tahun	Variabel	Brunei Darussalam	Indonesia	Malaysia	Singapura	Thailand
2007	Political Stability and Absence of Violence	1.106725	-1.1963	0.193773	1.174122	-1.11144
2008	Political Stability and Absence of Violence	1.126965	-1.05838	0.108325	1.345581	-1.27144
2009	Political Stability and Absence of Violence	1.387627	-0.75139	-0.04238	1.179446	-1.42479

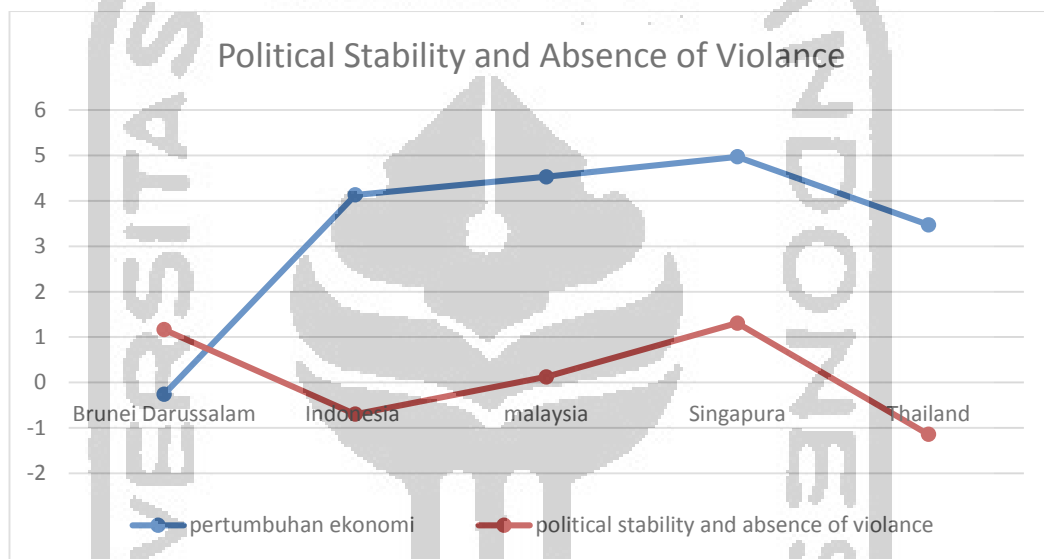
2010	Political Stability and Absence of Violence	1.277547	-0.85392	0.143352	1.169415	-1.44279
2011	Political Stability and Absence of Violence	1.085194	-0.77011	0.07741	1.191422	-1.13353
2012	Political Stability and Absence of Violence	0.9093272	-0.59326	-0.00521	1.368175	-1.21663
2013	Political Stability and Absence of Violence	1.074022	-0.51926	0.051792	1.378178	-1.31168
2014	Political Stability and Absence of Violence	1.261507	-0.41682	0.266619	1.186271	-0.90639
2015	Political Stability and Absence of Violence	1.242662	-0.61506	0.258958	1.311753	-0.99443
2016	Political Stability and Absence of Violence	1.154172	-0.37295	0.136825	1.495759	-0.98858
2017	Political Stability and Absence of Violence	1.189136	-0.51181	0.160816	1.585588	-0.75731
Rata-rata		1.164989	-0.6963	0.122753	1.307792	-1.14173

Sumber : World Bank, 2018

Political stability and absence of violence adalah ukuran persepsi bahwa pemerintah akan stabil atau dapat digulingkan oleh undang-undang atau dengan cara kekerasan, pada tabel 1.3 dapat di ketahui bahwa 5 negara ASEAN memiliki *political stability and absence of violence* dengan angka, Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia memiliki prestasi indeks kestabilan politik yang baik

dengan rata-rata tiap negara sebesar 1.30, 1.16 dan 0.12 sedangkan Thailand dan Indonesia menunjukkan prestasi kestabilan politik yang buruk dengan rata-rata tiap negara sebesar -1.14 dan -0.69 maka dapat dilihat dari gambar 1.2 di bawah ini:

Gambar 1. 2 rata-rata Politocal Stability and Absance Violance di 5 negara ASEAN



Gambar 1.2 memperlihatkan *Political Stability and Absance Violance* kestabilan tatanan pemerintahan pemerintah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN tinggi. Karena pertumbuhan ekonomi negara tergantung pada tata kelola pemerintahannya. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan *Political Stability and Absance Violance* sudah berjalan dengan baik.

Tabel 1. 4 Regulatory Quality 5 Negara ASEAN Tahun 2007-2017 (%)

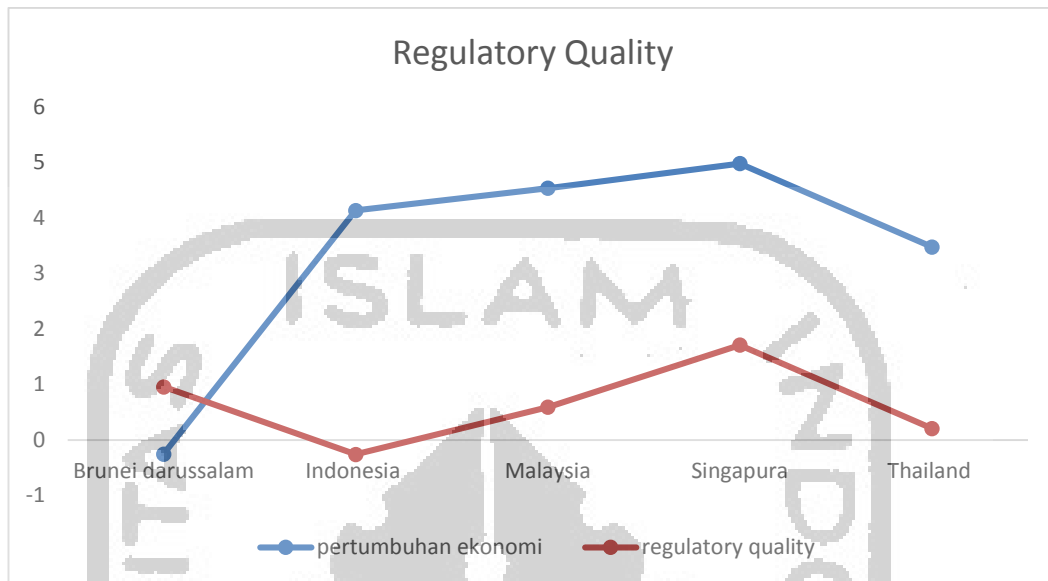
Tahun	Variabel	Brunei Darussalam	Indonesia	Malaysia	Singapura	Thailand
2007	Regulatory Quality	0.9862139	-0.3449852	0.506119	1.612359	0.1428552
2008	Regulatory Quality	0.7837868	-0.3482862	0.3163688	1.606087	0.2105248

2009	Regulatory Quality	1.087068	-0.3617966	0.3036891	1.566005	0.2179662
2010	Regulatory Quality	1.110249	-0.415857	0.5889426	1.625942	0.1737148
2011	Regulatory Quality	1.154296	-0.3519141	0.5820687	1.669992	0.2016357
2012	Regulatory Quality	1.151749	-0.2787625	0.5704837	1.731186	0.2435732
2013	Regulatory Quality	1.105576	-0.1954409	0.636703	1.705524	0.2265044
2014	Regulatory Quality	0.9851288	-0.1076597	0.8377209	1.824775	0.2732638
2015	Regulatory Quality	0.852387	-0.2175578	0.7526733	1.813492	0.2920193
2016	Regulatory Quality	0.5933974	-0.1223439	0.7117952	1.825278	0.1680702
2017	Regulatory Quality	0.7154635	-0.1063154	0.6835025	1.822819	0.1407958
Rata-rata		0.956847	-0.25917	0.590006	1.709405	0.208266

Sumber : *World Bank*, 2018

Regulatory Quality merupakan ukuran kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan dan mempromosikan pengembangan sector swasta, tabel 1.4 menunjukkan bahwa prestasi *regulatory quality* 5 negara ASEAN dari tahun 2007-2017 memiliki prestasi yang baik Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand indeks prestasi yang baik dengan rata-rata tiap negara sebesar 1.70, 0.95, 0.59 dan 0.20. sementara Indonesia menunjukkan prestasi indeks *regulatory quality* yang buruk dengan rata-rata nilai indeks sebesar -0.25 maka dapat dilihat dari gambar 1.3 di bawah ini:

Gambar 1. 3 rata-rata Regulatory Quality di 5 negara ASEAN



Gambar 1.3, memperlihatkan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN. Maka indeks *regulatory quality* di lima negara ASEAN dapat ditingkatkan sehingga pertumbuhan ekonomi semakin baik.

Tabel 1. 5 Voice and Accountability 5 Negara ASEAN Tahun 2007-2017 (%)

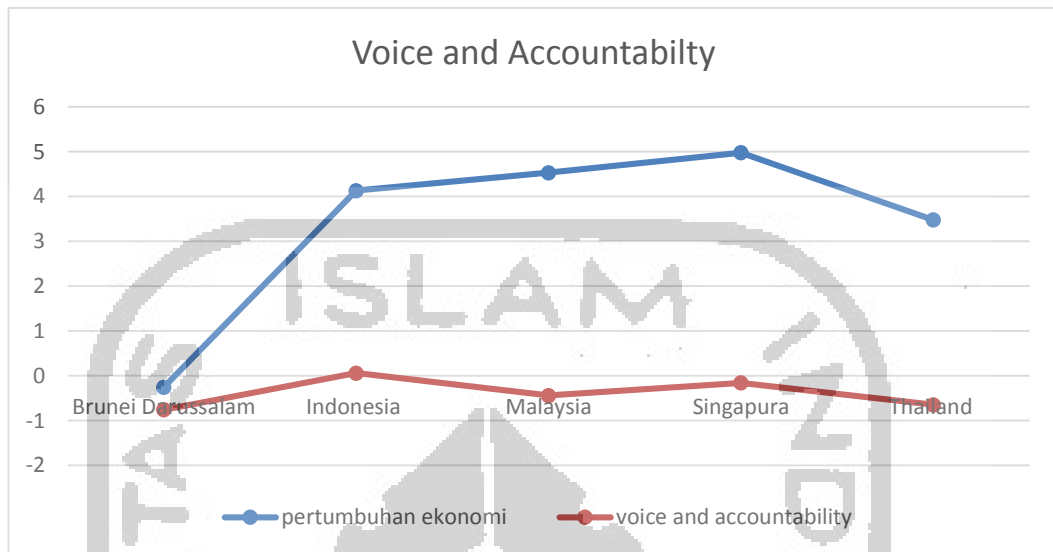
Tahun	Variabel	Brunei darussalam	Indonesia	Malaysia	Singapura	Thailand

2007	Voice and Accountability	-1.061537	-0.0198048	-0.523537	-0.36321	-0.562502
2008	Voice and Accountability	-1.018134	-0.0112615	-0.563193	-0.334836	-0.529667
2009	Voice and Accountability	-0.7307153	-0.0010406	-0.503895	-0.234221	-0.455884
2010	Voice and Accountability	-0.6505712	-0.0377742	-0.499978	-0.208966	-0.495822
2011	Voice and Accountability	-0.6103393	-0.008531	-0.474875	-0.102027	-0.405182
2012	Voice and Accountability	-0.5063741	0.0676126	-0.346539	0.053091	-0.321141
2013	Voice and Accountability	-0.5050725	0.0361213	-0.339679	0.036768	-0.429926
2014	Voice and Accountability	-0.6250251	0.1539049	-0.360303	-0.098659	-0.874783
2015	Voice and Accountability	-0.7541118	0.1848372	-0.391463	-0.161822	-0.969056
2016	Voice and Accountability	-0.9010231	0.1666685	-0.418355	-0.15045	-1.025071
2017	Voice and Accountability	-0.9484066	0.1298718	-0.400317	-0.169344	-1.047005
Rata-rata		-0.75557	0.060055	-0.43838	-0.15761	-0.64691

sumber : World Bank, 2018

Voice and Accountability adalah sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi memilih partai dan pemimpin, serta kebebasan berpendapat, berserikat dan menentukan kebijakan publik, tabel 1.5 memperlihatkan bahwa prestasi ke 5 negara ASEAN tidak begitu baik dari tahun 2007-2017, Indonesia menunjukkan indeks *voice and accountability* yang cukup baik dengan indeks rata-rata 0.06 sedangkan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand menunjukkan indeks *voice and accountability* yang cukup buruk dengan rata-rata sebesar -0.15, -0.43, -0.75 dan -0.64 maka dapat dilihat dari gambar 1.4 di bawah ini:

Gambar 1. 4 rata-rata Voice and Accountability di 5 negara ASEAN



Gambar 1.4 memperlihatkan *Voice and Accountability* para pembuat keputusan dalam pemerintah yang baik. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka dengan adanya *Voice and Accountability* yang jelas dapat mengurangi pengambilan keputusan yang merugikan masyarakat.

(Guan, 2009) dalam penelitiannya yang berjudul *Growth Theory Needs an Institutional Structure* mengungkapkan bahwa teori pertumbuhan Neoklasik dan Endogen yang dipelopori oleh Solow dan Romer tidaklah cukup untuk menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi, kedua teori tersebut mengabaikan struktur intuisi, padahal intuisi diyakini akan mampu memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai pertumbuhan ekonomi. (Barro, 1996), juga mengungkapkan bahwa teori pertumbuhan Endogen tidak berbeda dari teori pertumbuhan yang diungkapkan oleh Solow. Teori ini hanya memperluas variabel model dengan melibatkan komponen modal manusia.

Penelitian yang dilakukan (Hasyim, 2008), menemukan bahwa negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi memiliki karakteristik institutional yang baik, yang diukur dengan beberapa variabel, seperti efisiensi peradilan, kebebasan ekonomi, tingkat korupsi yang rendah pemerintah yang efektif serta perlindungan terhadap properti. Kebebasan ekonomi adalah faktor penting dalam mempengaruhi pertumbuhan dan investasi, kebebasan ekonomi juga menggambarkan sebuah institusi yang baik.

Menurut (Healey, 2009), tata pemerintahan yang baik adalah efektivitas organisasi tingkat tinggi dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan dan yang benar-benar dijalankan, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan. Penelitian (Evans, 1996), berjudul *Bureaucracy and growth : A Cross-National Analysis of the Effects of "Weberian" State Structures on Economics Growth* mengungkapkan tentang pengaruh birokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pada 35 negara berkembang tahun 1970-1990. Penelitian tersebut menggunakan data GDP sebagai pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor dalam birokrasi dengan kebijakan pemerintahan. Hasilnya menunjukkan bahwa birokrasi Weberian mempunyai pengaruh yang signifikan dan layak masuk dalam model pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, menjelaskan bahwa tata kelola pemerintah yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dimana institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan

masyarakat berperan aktif dan positif dalam interaksi sosial melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi lain-lain.

Beberapa data mengenai pertumbuhan ekonomi, *government effectiveness*, *political stability and absence of violence*, *regulatory quality* dan *voice and accountability* di ASEAN tidak seluruhnya memiliki anggota yang mapan dalam perekonomian (ASEAN Matters For America, 2013), Kondisi yang terjadi seperti Myanmar, Kamboja dan Laos menimbulkan pertanyaan kepada penulis, dimana dengan keadaan *government effectiveness*, *political stability and absence of violence*, *regulatory quality* dan *voice and accountability* yang dapat dikatakan buruk namun ketiga negara tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi hal ini berbanding terbalik dengan anggota ASEAN, ketika indikator *good governance* mendapat prestasi yang baik justru ekonominya rendah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik menyusun penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara di ASEAN Tahun 2007-2017”**

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, dapat diketahui bahwa *good governance* yang telah berjalan dari tahun 1996 memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas politik, sistem politik yang sehat dan menyediakan *public services* yang efektif dan akuntabilitas (Grey, 2007), Hal ini meningkatkan efektifitas penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terjadi adanya ketidak sinkronan antara indikator *good governance* dengan pertumbuhan ekonomi ASEAN periode tahun 2007-2017. Maka yang akan dianalisis dalam pembahasan ini adalah seperti apa peran pelaksanaan *good governance* dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.

Didasari latar belakang tersebut muncul pertanyaan penelitian yang dapat ditemukan adalah :

1. Bagaimana pengaruh *government effectiveness* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN?
2. Bagaimana pengaruh *political stability and absence of violence* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN?
3. Bagaimana pengaruh *regulatory quality* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN?
4. Bagaimana pengaruh *voice and accountability* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 negara ASEAN secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh *government effectiveness* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama periode 2007-2017.

2. Menganalisis pengaruh *political stability and absence of violence* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama periode 2007-2017.
3. Menganalisis pengaruh *regulatory quality* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama periode 2007-2017.
4. Menganalisis pengaruh *voice and accountability* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama periode 2007-2017.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.
2. Diharapkan sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun daerah di negara-negara ASEAN guna menetapkan kebijakan publik dan membangun kualitas tata pemerintahan yang baik.